

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Pramono, S, 2013, *Pengendalian Keuangan Partai Politik*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta.
- (Depdiknas), Pusat Bahasa, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (edisi Ketiga), Balai Pustaka, Jakarta.
- Firmanzah, 2008, *Mengelola Partai Politik : Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Deokrasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Budiardjo, M, 1988 *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Subekti, R, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Saidi, MD, 2008, *Hukum keuangan Negara*, Rajawali Perss, Jakarta.
- (Bepeka), Tim, 1998, *Keuangan Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan*, Penerbit Bepeka, Jakarta.
- Tjandra, WR, 2006, *Hukum Keuangan Negara*. PT.Grasindo, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 2008, *Hukum Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sidik, P, 2013, *pengendalian Keuangan Partai Politik, Kemitraan bagi PembaruanTata Pemerintahan*, Jakarta.
- Rachmadsyah, S, "Sanksi Hukum (pidana,perdata dan administratif)" , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarso, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kartanegara, S, 1979, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa.
- Hadjon, PM, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- (Prima Pena), Tim, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Press.
- Soedarto, R, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sholehudin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, ide dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Anonim, 2011, *KUHP dan KUHPA*, Sinar Grafika, Jakarta.

Waluyo, B, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ridwan, HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

Dewata, MFN, Achmad, Y, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Soekanto, S, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

Marzuki, PM, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana.

### **Jurnal**

Ichwan Nur Fadillah, "Pendidikan Politik oleh Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Kota Pekanbaru Tahun 2015-2016", *JOM Fisip*, Volume 4 No.1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau (Februari 2017).

Mohamad Iqbal, "Kedudukan Partai Politik Dalam Menerima Bantuan Keuangan Parpol", *Jurnal Katalogis*, Volume 4 No.6, Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako (Juni 2016).

Dewi Kurniasih, Tatik Rohmawati, "Pelaksanaan Fungsi Komunikasi Partai Politik (Studi Pemilihan Walikota Bandung 2013)", *Jurnal Majalah Ilmiah Unikom*, Volume 11 NO.3, Universitas Komputer Indonesia (Oktober 2013).

Muhammad Arifin Nasution, "Peran Partai Politik Dalam Pendidikan dan Wawasan Kebangsaan", *Jurnal Politeia*, Volume 4 No.1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. (Januari 2012).

Hasbi Umar, "Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Pendekatan Terhadap Pemilu DPR/DPRD", *Jurnal Innovatio*, Vol. VII, No.14, Edisi (Juli-September 2008).

Eddy Purnama, "Lembaga Perwakilan Checks and Balances Dalam Kekuasaan Negara", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. LXII, No.7 (Agustus 2014).

Ellya Rosana, "Partai Politik dan Pembangunan Politik", *Jurnal TAP Is*, Vol. I No. 1 (Januari, 2012).

Leli Salman Al Farisi, “Partai Politik dan Demokrasi: Masihkah Partai Politik Sebagai pilar Utama Dalam Demokratisasi Pemerintahan Indonesia?”, *Jurnal Aspirasi*, Vol. I, No. 5 (Agustus 2015).

M. Arsyad Mawardi, “Pengawasan dan Keseimbangan Antara DPR dan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan RI”, *Jurnal Hukum*, Vol. I, No. 3 (Januari 2008).

Hezky Fernando Pitoy, “Mekanisme Check dan Balances Kedalam Konstitusi”, *Jurnal Kostitusi*, Vol. III, No. 4 (September, 2016).

### **Peraturan Perundang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata cara Penghitungan Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Peraturan Daerah Kabupatn Bantul Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2012 tentang Bantuan keuangan Kepada Partai Politik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)